

Metodologi Penelitian Derajat Kepublikan Ruang Terbuka Publik Perkotaan

Fath Nadizti¹, Himasari Hanan²

¹ Program Doktor Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

² Kelompok Keahlian Teori, Sejarah dan Kritik Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

Email korespondensi: nadizti@gmail.com

Diterima: 04-11-2021

Direview: 10-02-2022

Direvisi: 23-02-2022

Disetujui: 12-05-2022

ABSTRAK. Derajat kepublikan (*degree of publicness*) adalah satu pendekatan untuk menilai sejauh mana sebuah ruang terbuka bersifat publik. Pendekatan ini berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Artikel ini menjelaskan tentang dinamika dan perkembangan penelitian derajat kepublikan melalui kajian literatur. Terdapat delapan jurnal ilmiah dan satu buku yang dikaji secara kualitatif menggunakan metode analisis isi. Artikel ini menemukan bahwa kunci dari derajat kepublikan adalah penyesuaian indikator-indikator terhadap konteks tempat dan budaya sebuah ruang terbuka publik perkotaan. Di Indonesia, konteks budaya dalam proses pengembangan kota dan identifikasi kekhasan lokal menjadi dua hal penting dalam menerapkan pendekatan derajat kepublikan.

Kata kunci: derajat kepublikan, ruang publik

ABSTRACT. *The degree of publicness is an approach to assessing the extent to which an open space is public. This approach has grown rapidly over the last twenty years, particularly in Europe and the United States. This article describes the dynamics and development of publicity research through a literature review. Eight scientific journals and one book were qualitatively reviewed using the content analysis method. This article finds that the key to the degree of publicity is adjusting the indicators to the context of the place and culture of an urban open space. In Indonesia, the cultural context of the city development process and local characteristics are two important things in the application of the degree of publicity approach.*

Keywords: *degree of publicness, public spaces*

PENDAHULUAN

Derajat kepublikan (*degree of publicness*) merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui sifat ruang terbuka publik perkotaan secara menyeluruh. Pendekatan ini berangkat dari diskursus privatisasi ruang publik di Eropa dan Amerika sejak dua dekade lalu. Pendekatan derajat kepublikan meyakini bahwa ruang terbuka publik di perkotaan tidak bisa dinilai dari sudut pandang dikotomi publik dan privat. Setiap ruang terbuka publik perkotaan memiliki berbagai dimensi yang membuat ruang tersebut bersifat publik. Dimensi-dimensi tersebut disebut dengan dimensi kepublikan (*publicness dimension*), dan kadarnya

berbeda-beda di setiap ruang. Kadar dari setiap dimensi itulah yang dinilai secara menyeluruh dalam pendekatan derajat kepublikan. Dengan demikian, menilai sebuah ruang terbuka tidak terbatas antara label “ruang publik” atau “ruang privat” saja, melainkan terdapat gradasi diantaranya. Namun demikian, penelitian derajat kepublikan masih terbatas pada lingkup negara barat. Sedangkan di Indonesia, terdapat kekhasan geografi, sosial, dan budaya yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pengembangan ruang terbuka publik perkotaan (Darmawan 2005, 2014). Artikel ini merupakan kajian literatur yang membahas dinamika dan

perkembangan metodologi yang digunakan dalam penelitian derajat kepublikan, beserta prospek penerapannya dalam konteks perkotaan di Indonesia. Dengan melihat sifat ruang terbuka publik perkotaan di Indonesia secara menyeluruh, maka intervensi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ruang tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) digunakan dalam kajian ini agar dapat melihat perkembangan literatur metode penelitian derajat kepublikan secara eksploratif. Terdapat delapan artikel ilmiah dan satu buku yang menjadi objek kajian. Artikel ilmiah terpilih adalah yang diterbitkan oleh jurnal bereputasi internasional. Sedangkan buku yang dikaji merupakan perkembangan dari dua jurnal terpilih dan diterbitkan oleh penerbit dengan terakreditasi. Dalam proses analisis isi, setiap literatur diperlakukan sebagai teks (Stemler, 2000). Potongan informasi tentang sejarah, pengertian, langkah penelitian, dan hasil di dalam teks dipecah menjadi kode. Kemudian, setiap kode diabstraksi menjadi kategori yang lebih besar untuk meringkas data lebih jauh (Hsieh & Shannon, 2005). Kemudian, kategori-kategori tersebut disusun sehingga menjadi pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis isi teks penelitian derajat kepublikan menunjukkan bahwa setiap penelitian memiliki dimensi kepublikan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena masing-masing penelitian memiliki latar belakang dan konteks empiris yang khas. Namun demikian, seluruhnya menggunakan langkah metodologi yang dimulai dari perumusan dimensi kepublikan, penentuan indikator operasional, sampai proses pengukuran empiris.

Latar Belakang Penelitian Derajat Kepublikan Ruang Terbuka Publik Perkotaan

Munculnya penelitian derajat kepublikan dimotivasi oleh tiga tema diskursus ruang terbuka

publik perkotaan. Tema pertama adalah fenomena perubahan pola penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik perkotaan dengan cara melibatkan sektor privat. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan paradigma pemerintahan menjadi lebih demokratis. Hasilnya, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka publik dilakukan dalam rangka “merespon kebutuhan pengguna melalui mekanisme yang akuntabel” (De Magalhães 2010:565). Penelitian derajat kepublikan yang dilakukan oleh Van Melik et al. (2007), Magalhães (2010), Németh & Schmidt (2011), serta Németh (2012) berangkat dari fenomena tersebut. Masing-masing penelitian menganalisa tipologi ruang terbuka publik tertentu. Van Melik dan kawan-kawan mengidentifikasi dua tipe ruang terbuka publik perkotaan yang berorientasi komersial, yaitu *'secured public space'* untuk ruang yang memberikan rasa aman dan *'themed public space'* untuk ruang yang atraktif. Németh dan Schmidt menganalisa ruang terbuka publik secara umum, sedangkan Magalhães cenderung fokus pada ruang terbuka yang berhubungan erat dengan otoritas publik seperti *'Georgian and Victorian square'*. Terlepas dari tipologi ruang terbuka publik yang diteliti, dimensi kepublikan ruang mengikutsertakan sektor privat dalam hal manajemen dan pengelolaan.

Tema kedua yang memotivasi penelitian derajat kepublikan adalah kritik tentang lemahnya kontrol terhadap fenomena keterlibatan sektor privat dalam keberlangsungan ruang terbuka publik perkotaan. Kelompok kritik ini mengatakan bahwa dengan masuknya sektor privat ke ruang terbuka publik, maka sifat publik dari ruang tersebut otomatis hilang. Beberapa terminologi baru muncul untuk menamai jenis ruang terbuka publik tersebut, seperti *'private-public spaces'*, *'privatized public spaces'*, *'pseudo-public spaces'* (Banerjee 2001), dan -yang juga dianggap cukup keras- *'the end of public space'¹* (Sorkin 1992).

¹ Berangkat dari komparasi lansekap kota Amerika kontemporer sampai taman tematik *Disneyland*, Sorkin mengatakan bahwa ruang terbuka menyediakan kesenangan untuk kelompok tertentu, dan pada saat yang sama sangat dikontrol dan diawasi. Singkatnya, kepublikan dan keterbukaan ruang hanya ilusi belaka.

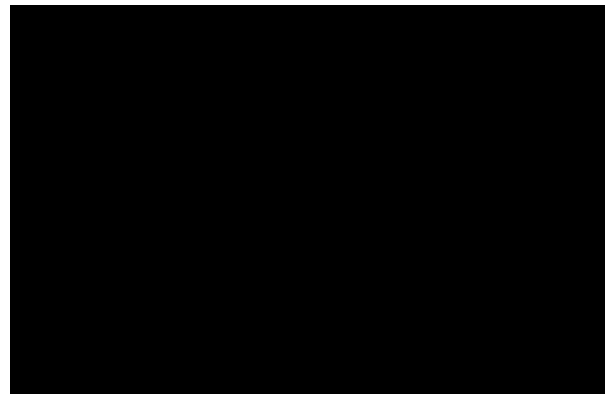
Namun demikian, menurut Varna dan Tiesdell (2010), Varna (2014), Ekdi & Çiraci (2015), kritik tersebut tidak kuat karena menilai ruang terbuka publik secara parsial. Dasar yang digunakan untuk membangun kritik tidak mampu “mendefinisikan konsep [kepublikan ruang terbuka] secara utuh dan tidak menyediakan alat untuk melihat menganalisa lebih dalam dimensi kepublikan yang ada” (Varna & Tiesdell 2010:576). Secara spesifik, penelitian derajat kepublikan yang dilakukan oleh Magalhães (2010) melihat peran swasta dalam pengelolaan ruang publik. Penelitian tersebut membuktikan bahwa keterlibatan sektor privat tidak serta merta menghilangkan sifat kepublikan sebuah ruang, melainkan merupakan bentuk usaha untuk mencapai kualitas ruang yang lebih baik.

Tema ketiga adalah diskursus tentang celah antara dunia riset dan praktik pengembangan kota secara umum. Ruang terbuka publik berperan besar terhadap kehidupan perkotaan. Laporan dan penelitian dari institusi akademik dan organisasi internasional menunjukkan adanya hubungan yang berbanding lurus antara kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik perkotaan terhadap kehidupan yang berlangsung (Angel, 2011; Mboup, Warah, & United Nations Human Settlements Programme, 2013; UN Habitat, 2015). Dengan demikian, meningkatkan peran ruang terbuka publik akan membuat kehidupan perkotaan lebih baik (Madanipour, 2010). Namun dengan kompleksnya kondisi pengelolaan ruang terbuka publik perkotaan seperti yang disampaikan sebelumnya, sulit untuk diketahui dimana dan bagaimana persisnya intervensi untuk peningkatan peran bisa diberikan. Terdapat banyak keterbatasan dan kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi, seperti waktu, pembiayaan, dan ketersediaan sumber daya, yang pada akhirnya membuat intervensi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Mengurangi celah antara pengetahuan dan penerapan menjadi salah satu manfaat dari penelitian derajat kepublikan secara umum (Varna, 2014). Varna dan Cerrone (2013:102) mengemukakan tujuan tersebut secara gamblang dalam penelitiannya sebagai berikut: “Representasi derajat kepublikan yang cepat, penuh informasi, dan langsung menuju sasaran dapat memberikan dasar yang kuat untuk para pemangku kebijakan memahami di mana dan

bagaimana ruang terbuka publik gagal atau sukses.”

Langkah Penelitian Derajat Kepublikan Ruang Terbuka Publik Perkotaan

Penelitian derajat kepublikan didorong untuk bisa mengukur secara tepat tingkat kepublikan sebuah ruang terbuka. Hal tersebut berarti dimensi kepublikan yang berada di level konseptual perlu diturunkan ke level operasional, kemudian diukur dengan sistem nilai atau skor yang telah ditentukan. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian derajat kepublikan yang dibahas di makalah ini berbeda antara satu dengan yang lain. Namun secara umum, terdapat tiga langkah pengukuran (Gambar 1), yaitu perumusan dimensi kepublikan, penentuan indikator operasional, dan pengukuran derajat kepublikan.



Gambar 1. Langkah umum penelitian derajat kepublikan.

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Perumusan dimensi kepublikan

Perumusan dimensi kepublikan pada kesembilan penelitian yang dibahas dalam makalah ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu yang berangkat dari kajian pustaka. Pendekatan deduktif diharapkan dapat memberikan dimensi kepublikan yang universal (Varna 2014). Diskursus tentang keberhasilan dan kegagalan ruang terbuka publik perkotaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade telah banyak menghasilkan keluaran berupa sifat kepublikan yang ada pada ruang terbuka publik. Beberapa literatur yang sering dikaji antara lain adalah buku-buku karya

Stephen Carr dan kawan-kawan (1992), Ali Madanipour (2003), Margaret Kohn (2004), Matthew Carmona (2008), beserta karya klasik Jürgen Habermas (1991). Digunakan juga jurnal ilmiah yang beberapa diantaranya ditulis oleh penulis buku tersebut. Keberagaman pustaka yang digunakan pada masing-masing penelitian menghasilkan dimensi kepublikan yang berbeda seperti dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Dimensi Kepublikan Pada Penelitian Derajat Kepublikan.

No.	Penelitian	Dimensi Kepublikan
1	Van Melik et al. (2007)	'Secured public space'
		1. Surveillance
		2. Restraints on loitering
		3. Regulation
		'Themed public space'
		4. Events
5. Funshopping		
6. Pavement cafes		
2	Németh dan Schmidt (2011)	1. Ownership
		2. Management
		3. Users
3	Varna dan Tiesdell (2010)	1. Ownership
		2. Control
		3. Civility
		4. Physical Configuration
		5. Animation
4	Magalhães (2010)	1. Rights of Access
		2. Rights of Use
		3. Ownership/ Control
5	Németh (2012)	1. Physical
		2. Code
		3. Content
6	Varna dan Cerrone (2013)	1. Ownership
		2. Control
		3. Civility
		4. Physical Configuration
		5. Animation
7	Langstraat dan Van Melik (2013)	1. Ownership
		2. Management
		3. Accessibility
		4. Inclusiveness
8	Varna (2014)	1. Ownership
		2. Control
		3. Civility
		4. Physical Configuration
		5. Animation
9	Ekdi dan Çıracı (2015)	1. Management
		2. Access
		3. Users

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Tabel 1 menunjukkan perbedaan dimensi kepublikan pada setiap penelitian, kecuali pada

nomor tiga, enam, dan delapan. Ketiga penelitian tersebut memiliki dimensi kepublikan yang sama, yaitu *Ownership, Control, Civility, Physical Configuration, dan Animation*. Hal itu terjadi karena penelitian 1) menggunakan sumber literatur yang sangat mirip dalam kajian pustaka, dan 2) dilakukan oleh peneliti yang sama. Jika dilihat lebih jauh, penelitian nomor tiga adalah langkah awal yang dikembangkan pada penelitian nomor enam, dan kemudian dibakukan dalam bentuk buku, yaitu pada penelitian nomor delapan

Penentuan indikator dan pengukuran derajat kepublikan

Dimensi kepublikan yang berada pada level konseptual perlu diturunkan ke level operasional agar dapat digunakan untuk mengukur derajat kepublikan sebuah ruang. Setiap dimensi kepublikan diturunkan menjadi indikator. Kemudian setiap indikator ditentukan sub-indikator dan pembobotan nilai pada masing-masingnya. Sebagai pendekatan yang pragmatis, tidak ada aturan baku tentang bagaimana penurunan tersebut dilakukan (Németh and Schmidt 2011; Varna and Tiesdell 2010). Masing-masing penelitian memiliki caranya sendiri dalam menentukan indikator. Namun, secara umum penurunan level tersebut dilakukan secara induktif dari pengamatan empiris, dan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan analisa dokumen peraturan.

Variabel operasional yang sudah ditentukan dari indikator, sub-indikator, dan pembobotannya dibentuk menjadi alat pengambilan data berupa kuesioner, lembar observasi, pertanyaan wawancara, dan lain-lain. Secara umum alat tersebut bersifat kuantitatif sehingga pengukuran tidak harus dilakukan langsung oleh peneliti. Pengambilan data dapat didelegasikan ke penyurvei atau pengamat, dengan catatan diberikan pengarahan dan panduan yang lengkap terlebih dahulu. Kebebasan dalam menurunkan dimensi kepublikan ke ranah operasional membuat setiap penelitian menjadi unik. Misalnya perbedaan operasionalisasi dimensi kepublikan yang berkaitan dengan pengendalian yang terjadi antara penelitian yang dilakukan oleh Van Melik et al. (2007) dan Varna dan Cerrone (2013). Van Melik

et al. (2007) menentukan CCTV sebagai indikator dari dimensi pengawasan ‘*Surveillance*’. Pembobotan nilai ditentukan berdasarkan intensitasnya, yaitu rendah/ *Low* (L), sedang/ *Medium* (M), dan tinggi/ *High* (H). Jika tidak ada CCTV, maka dimensi ‘*Surveillance*’ bernilai rendah. Jika CCTV dipasang dan merekam kegiatan di ruang terbuka publik yang diteliti, maka dimensi ‘*Surveillance*’ bernilai sedang. Jika CCTV yang dipasang berfungsi untuk mengawasi ruang tersebut secara langsung, maka dimensi ‘*Surveillance*’ bernilai tinggi. Sedangkan Varna dan Cerrone (2013) menggunakan cara yang lebih cair. Dimensi kepublikan tentang pengawasan dengan terminologi ‘*Control*’ tidak menyebutkan CCTV sebagai indikatornya. Melainkan menjelaskan bahwa sebuah ruang akan bersifat lebih publik jika perasaan nyaman dan bebas pengguna muncul dengan kehadiran pihak kontrol, dan sebaliknya.

Perkembangan pengukuran derajat kepublikan

Begitu banyak varian metodologi yang bisa digunakan untuk mengukur derajat kepublikan. Namun, yang menarik adalah bagaimana penelitian derajat kepublikan berkembang dari keberagaman tersebut. Perkembangan ini dapat dilacak melalui ragam hasil pengukuran derajat kepublikan yang direpresentasikan secara visual (Tabel 2).

Tabel 2. Rangkuman Capaian Tahapan Penelitian Derajat Kepublikan.

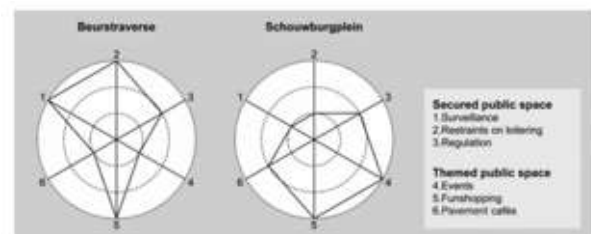
No.	Penelitian	Tahap Konseptual	Tahap Operasional	Tahap Pengukuran
1	Van Melik et al. (2007)	V	V	V
2	Németh dan Schmidt (2011)	V	V	V
3	Varna dan Tiesdell (2010)	V	V	-
4	Magalhães (2010)	V	-	-
5	Németh (2012)	V	-	-
6	Varna dan Cerrone (2013)	V	V	V
7	Langstraat dan Van Melik (2013)	V	V	V
8	Varna (2014)	V	V	V
9	Ekdi dan Çıracı (2015)	V	V	V

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Selanjutnya, hasil pengukuran derajat kepublikan digambarkan melalui representasi visual. Van

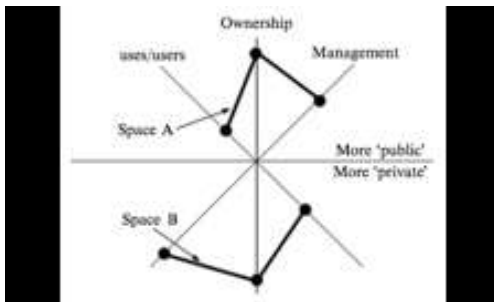
Melik et al. mengawali visualisasi derajat kepublikan dengan diagram ‘Coweb’ (Gambar 2). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Németh dan Schmidt beberapa tahun berikutnya, merumuskan tiga dimensi kepublikan dan kemudian menggambarkan hipotesa derajat kepublikan beberapa ruang terbuka publik di Kota New York dengan diagram ‘Triaxial’ (Gambar 3). Apa yang telah dilakukan oleh dua penelitian tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga dua penelitian berikutnya (Gambar 4 dan 5) berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Lima dimensi kepublikan dirumuskan, dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram bintang atau ‘Star Model’. Berikutnya, formulasi dimensi kepublikan lain, yang juga diklaim lebih lengkap dari penelitian-penelitian terdahulu, beserta visualisasinya dikembangkan oleh Langstraat dan Van Melik (Gambar 6). Empat dimensi kepublikan digunakan untuk menggambarkan diagram OMAI (*Ownership, Management, Accessibility, dan Inclusiveness*) yang berbentuk ‘Bull’s eye’. Satu tahun kemudian, ‘Star Model’ dibakukan dalam bentuk buku (Gambar 7) yang berjudul *Measuring Public Space: The Star Model* pada tahun 2014.

Perkembangan terakhir yang bisa ditelusuri adalah penelitian yang dilakukan oleh Ekdi dan Çıracı (Gambar 8). Penelitian tersebut mengkritik bahwa “keempat model sebelumnya, yang berdasarkan pada logika Boolean (atau teori klasik), tidak kaya (*crisp*), deterministik dan bersifat pasti” (Ekdi and Çıracı 2015:662). Padahal dimensi kepublikan dan pengukurannya tidak bisa ditentukan secara jelas. Hasilnya, muncul pendekatan fuzzy logic yang tidak secara geometris menggambarkan derajat kepublikan ruang terbuka publik perkotaan.

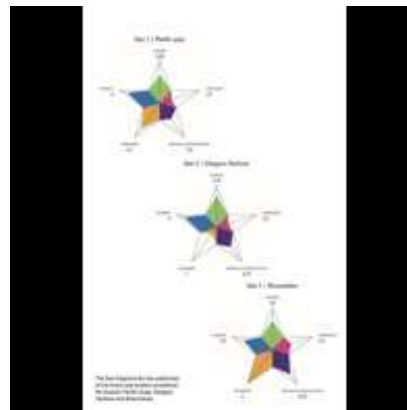


Gambar 2. Diagram “Coweb”

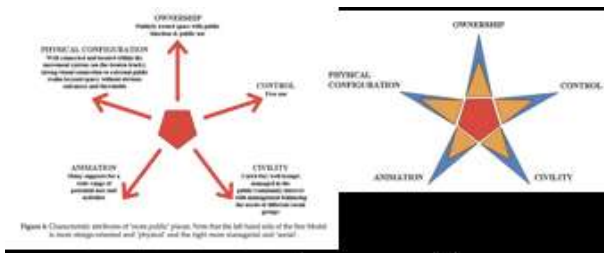
Sumber: Van Melik et al., 2007



Gambar 3. Diagram “Triaxial”
 Sumber: Németh dan Schmidt., 2011



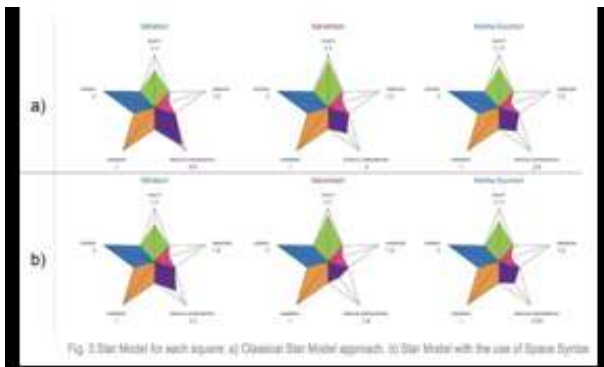
Gambar 7. Diagram “Star”
 Sumber: Varna, 2014



Gambar 4. Diagram Konseptual “Star Model”
 Sumber: Varna dan Tiesdell, 2010



Gambar 8. Diagram Logika “Fuzzy”
 Sumber: Ekdi dan Çıracı, 2015



Gambar 5. Diagram percobaan “Star Model”
 Sumber: Varna dan Cerrone, 2013



Gambar 6. Diagram “OMAI”
 Sumber: Langstraat Dan Van Melik, 2013

Prospek Penerapan Metodologi Penelitian Derajat Kepublikan Dalam Konteks Perkotaan Di Indonesia

Motivasi, dinamika dan perkembangan penelitian derajat kepublikan ruang terbuka publik perkotaan telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sifat dan peran ruang terbuka publik perkotaan. Namun demikian, pada saat yang sama, terdapat dua hal yang harus diperhatikan untuk menerapkannya dalam konteks perkotaan di Indonesia.

Kontektualisasi budaya Indonesia

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kontekstualisasi budaya Indonesia dalam penelitian. Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika. Perencanaan, perancangan, dan

penyediaan ruang terbuka publik di Indonesia dipengaruhi oleh kolonialisme dan posisinya sebagai 'negara ketiga' (*third world country*) (Edensor and Jayne 2012). Dibawah pengaruh kolonialisme, ruang kota dibagi oleh garis-garis zona untuk mengelompokkan ras dan status sosial tertentu.

Ketika periode kemerdekaan, ruang terbuka publik perkotaan digunakan untuk menunjukkan modernitas dan kekuasaan melalui bentuk yang monumental dan steril. Sedangkan posisi sebagai negara ketiga membuat wujud praktik kapitalisme dan liberalisme menjadi berbeda. Privatisasi ruang terbuka publik untuk mengembalikan nilai investasi dilakukan dalam berbagai bentuk hingga hari ini, seperti taman-taman di pemukiman eksklusif (Firman 2004) dan pusat-pusat perbelanjaan yang dirancang 'menyatu' dengan lingkungannya.

Pola pemerintahan di Indonesia pun secara tidak langsung memberi pengaruh pada peran dan fungsi ruang terbuka publik perkotaan hingga saat ini. Sejak tahun 1990-an, dikembangkan pendekatan dalam perencanaan dan perancangan kota yang berbasis pada distribusi konsentrasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke aktor lain yang berkepentingan. Pemerintah daerah, sektor privat, serta masyarakat ikut memiliki posisi dan porsi dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka publik perkotaan. Pendekatan tersebut menjelma dalam terminologi pembangunan kota, antara lain Desentralisasi, *Creative City* (Florida 2012; Landry 2000), serta *Smart City*. Dengan demikian, penerapan penelitian derajat kepublikan ruang terbuka publik dalam konteks perkotaan di Indonesia perlu memahami aspek sejarah dan budaya.

Identifikasi indikator lokal

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah operasionalisasi metode penelitian. Metodologi penelitian derajat kepublikan ruang terbuka publik perkotaan tidak baku, sehingga kombinasi metode sangat dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seperti yang telah diilustrasikan pada bab sebelumnya, cara untuk menentukan indikator, sub-indikator beserta pembobotan

nilainya ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan konteks lokasi penelitian.

Operasionalisasi penelitian derajat kepublikan sangat bergantung pada konteks budaya dan fakta yang ada di area penelitian. Misalnya, jika penentuan sub-indikator menggunakan metode observasi, pengamat sebaiknya paham dengan gestur dan tanda-tanda pada objek pengamatan di lapangan. Artinya, kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian derajat kepublikan bukan pada pemilihan metode, melainkan pada penggunaan metode yang dipilih.

KESIMPULAN

Ruang terbuka publik perkotaan bukan ruang sederhana yang bisa dinilai menggunakan perspektif dikotomi publik-privat. Penelitian derajat kepublikan ruang terbuka publik perkotaan menawarkan penilaian yang menyeluruh, bersifat gradasi, dan bahkan visual, sehingga bisa diketahui di mana dan bagaimana intervensi diperlukan. Penelitian tersebut juga memiliki metodologi yang cukup fleksibel untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan wilayah.

Penelitian derajat kepublikan ruang terbuka publik memiliki prospek untuk diterapkan dalam konteks perkotaan di Indonesia dengan memperhatikan dual hal. Yang pertama adalah kontekstualisasi budaya, karena, di tempat asalnya, penelitian ini dipengaruhi oleh motivasi dan konteks yang berbeda. Yang kedua adalah penggunaan metode penelitian. Dengan sifat metodologi penelitian yang cair, pemilihan metode bukan menjadi persoalan. Melainkan bagaimana metode yang dipilih digunakan secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, Shlomo. (2011). *Making Room for a Planet of Cities*. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Banerjee, Tridib. (2001). "The Future of Public Space: Beyond Invented Streets and Reinvented Places." *Journal of the American Planning Association* 67(1):9–24. doi: 10.1080/01944360108976352.

- Carmona, Matthew, Claudio de Magalhães, & Leo Hammond. (2008). *Public Space: The Management Dimension*. London ; New York: Routledge.
- Carr, Stephen, ed. 1992. *Public Space*. Cambridge [England] ; New York, NY, USA: Cambridge University Press.
- Darmawan, Edy. (2005). "Ruang Publik Dan Kualitas Ruang Kota." *Seminar Nasional PESAT*.
- Darmawan, Edy. (2014). "Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota." in *Aneka gagasan begawan arsitek tentang arsitektur, urbanisme, dan perancangan kota*, edited by E. Budihardjo. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- De Magalhães, Claudio. (2010). "Public Space and the Contracting-out of Publicness: A Framework for Analysis." *Journal of Urban Design* 15(4):559–74. doi: 10.1080/13574809.2010.502347.
- Edensor, Tim, & Mark Jayne, eds. (2012). *Urban Theory beyond the West: A World of Cities*. London ; New York: Routledge.
- Ekdi, Fatma Pelin, & Hale Çiracı. (2015). "Really Public? Evaluating the Publicness of Public Spaces in Istanbul by Means of Fuzzy Logic Modelling." *Journal of Urban Design* 20(5):658–76. doi: 10.1080/13574809.2015.1106919.
- Firman, Tommy. (2004). "New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation." *Habitat International* 28(3):349–68. doi: 10.1016/S0197-3975(03)00037-7.
- Florida, Richard L. (2012). *The Rise of the Creative Class: Revisited*. New York: Basic Books.
- Habermas, Jürgen. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Hsieh, Hsiu-Fang, & Sarah E. Shannon. (2005). "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15(9):1277–88. doi: 10.1177/1049732305276687.
- Kohn, Margaret. (2004). *Brave New Neighborhoods*. New York, NY: Routledge.
- Landry, Charles. (2000). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. London: Earthscan Publications.
- Madanipour, Ali. (2003). *Public and Private Spaces of the City*. London ; New York: Routledge.
- Madanipour, Ali, ed. (2010). *Whose Public Space?: International Case Studies in Urban Design and Development*. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.
- Mboup, Gora, Rasna Warah, & United Nations Human Settlements Programme. (2013). *Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity*.
- Németh, Jeremy. (2012). "Controlling the Commons: How Public Is Public Space?" *Urban Affairs Review* 48(6):811–35. doi: 10.1177/1078087412446445.
- Németh, Jeremy, & Stephen Schmidt. (2011). "The Privatization of Public Space: Modeling and Measuring Publicness." *Environment and Planning B: Planning and Design* 38(1):5–23. doi: 10.1068/b36057.
- Sorkin, Michael, ed. (1992). *Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space*. 1st ed. New York: Hill and Wang.
- Stemler, Steve. (2000). "An Overview of Content Analysis." *Practical Assessment, Research, and Evaluation* 7(17). doi: 10.7275/Z6FM-2E34.
- UN Habitat. (2015). *Habitat III Issue Paper 1 - Inclusive Cities*. UN Habitat.
- UN Habitat. 2015. *Habitat III Issue Paper 11 - Public Spaces*. UN Habitat.
- Van Melik, Rianne, Irina Van Aalst, & Jan Van Weesep. (2007). "Fear and Fantasy in the Public Domain: The Development of Secured and Themed Urban Space." *Journal of Urban Design* 12(1):25–42. doi: 10.1080/13574800601071170.
- Varna, George, & Steve Tiesdell. (2010). "Assessing the Publicness of Public Space: The Star Model of Publicness." *Journal of Urban Design* 15(4):575–98. doi: 10.1080/13574809.2010.502350.
- Varna, Georgiana. (2014). *Measuring Public Space: The Star Model*. Farnham, Surrey, UK ; Burlington, VT: Ashgate.
- Varna, Georgiana, & Damiano Cerrone. (2013). "Making the Publicness of Public Spaces Visible: From Space Syntax to the Star Model of Public Space." *EAEA-11 Conference*.
-